



**PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KATA PENGANTAR

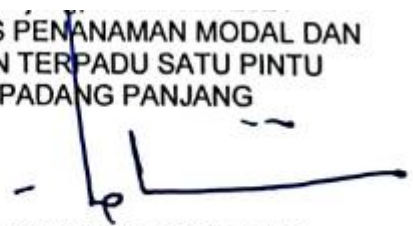
Rasa puji dan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan “Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024” dimana kami telah berupaya sedapat mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Padang Panjang melalui Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Penyusunan Rencana Kerja suatu instansi pemerintah daerah mutlak dilakukan karena merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Oleh sebab itu, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Iklim Investasi yang Kondusif , Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja yang Maju, Mandiri dan Islami”. Diharapkan agar target yang telah direncanakan dapat terpenuhi di setiap tahun anggaran sehingga visi tersebut dapat tercapai.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024. Semoga Allah SWT memberkahi usaha yang telah kita laksanakan ini.

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG



FHANDY RAMADHONA, SSTP, M.M

Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	5
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu dan Capaian Renstra	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah	19
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat	24
BAB III	25
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	26
3.3. Program dan Kegiatan	27
BAB IV	41
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	42
BAB V	49
P E N U T U P	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada BAB I Pasal 1 angka 30 dinyatakan bahwa :

“ Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. “

Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Dalam Pasal 126 ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Kemudian dalam Pasal 127 dijelaskan bahwa berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi rancangan RKPD.

Dengan demikian terlihat bahwa tahapan perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan RKPD. Hal ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang akhirnya akan menjadi pedoman/bahan dalam proses penyusunan RAPBD.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk satu (1) Tahun Anggaran yang berisikan penjabaran dari Visi, Misi, Prioritas dan Sasaran pembangunan untuk Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Padang Panjang disusun dengan melibatkan semua pihak terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disertai sebagian kewenangan oleh Walikota untuk menangani Penyelenggaraan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang.

1.2. Landasan Hukum.

Adapun landasan hukum disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

- i. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- l. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- n. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
- p. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;
- q. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dari Walikota Padang Panjang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
- r. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Untuk menjamin keterkaitan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang tahun lalu (Tahun 2023) pada umumnya telah dapat terlaksana dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 berikut ini.

TABEL 2.1.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA
KOTA PADANG PANJANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Urusan/Bidang non pelayanan dasar									
	Urusan/ Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
	Bidang urusan DPMPSTP		2,599,168,078	2,057,290,544	2,524,919,000	1,847,573,830	73.17%	2,089,736,640	5,902,611,040	
	Program pelayanan administrasi perkantoran									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		197,786,678	168,050,805	211,869,000	170,015,469	80.25%	202,993,473	541,059,747	267%
	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Outcome Tersedianya jasa surat menyurat	1,980,000	1,980,000	3,000,000	250,000	8.33%	3,000,000	5,230,000	174%
		Output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43,846,250	34,348,627	48,575,000	34,434,406	70.89%	49,999,590	118,782,623	238%

					Output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang Disediakan								
					Outcome Tersedianya jasa pelayanan umum kantor								
				Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	151,960,428	131,722,178	160,294,000	135,331,063	84.43%	149,993,883	417,047,124	278%
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		131,950,600	88,667,600	209,837,300	147,975,900	70.52%	120,521,890	357,165,390	296%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		66,080,000	54,488,000					54,488,000	
				Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Outcome Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	131,712,300	102,602,200	77.90%	70,799,290	173,401,490	245%
					Output Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
				Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome Terlaksananya Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	45,110,000	14,745,000	48,125,000	15,515,000	32.24%	29,722,600	59,982,600	202%
					Output Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								
				Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Outcome Terlaksananya Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	20,760,600	19,434,600	30,000,000	29,858,700	99.53%	20,000,000	69,293,300	346%
					Output Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi								
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		159,925,600	136,083,238	236,351,750	213,044,748	90.14%	297,774,561	646,902,547	217%

				Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Outcome Tersedianya bahan logistik kantor	18,085,000	16,965,000	35,396,500	33,791,500	95.47%	33,683,600	84,440,100	251%
					Output Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								
				Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Out come Persentase lancarnya pelayanan atas ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	24,944,500	19,121,200	27,475,000	17,721,200	64.50%	34,710,500	71,552,900	206%
					Output Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun								
					Output Tersedianya materai, pengiriman paket, ATK , barang cetakan, Fotocopy dan dekorasi untuk 1 tahun								
				Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Outcome Persentase penerangan kantor dan komponen listrikterpenuhi 100%	6,209,900	5,939,650	6,005,000	6,005,000	100.00%	2,623,911	14,568,561	555%
					Output Tersedianya kebutuhan penerangan kantor untuk komponen listrik selama 1 th								
				Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Outcome Presentase Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	110,686,200	94,057,388					94,057,388	
					Output Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah untuk 1 Tahun								
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Outcome Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	16,847,250	13,493,800	80.09%	7,014,300	20,508,100	292%
					Output Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Outcome Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0	0	150,628,000	142,033,248	94.29%	219,742,250	361,775,498	165%
					Output Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		72,640,800	67,060,075	29,700,000	28,496,000	95.95%	0	95,556,075	0%

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		72,640,800	67,060,075	29,700,000	28,496,000	95.95%		95,556,075	0.00 %
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		103,770,800	91,989,974						
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		103,770,800	91,989,974					91,989,974	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota		103,770,800	91,989,974					91,989,974	
				Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten/Kota		0	0				72,933,000	72,933,000	0.00%
				Program Pelayanan Penanaman Modal		199,537,600	170,515,722	114,562,800	111,151,990	97.02%	125,156,800	406,824,512	325.05%
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		99,768,800	85,257,861					85,257,861	
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Outcome Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	99,768,800	85,257,861	114,562,800	111,151,990	97.02%	110,956,800	307,366,651	0.00 %
					Output Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan								

				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Outcome Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0	0				14,200,000	14,200,000	0%
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Output Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
				Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
				Kegiatan Penyusunan Buku Profil Pelayanan	Outcome Jumlah buku profil mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan	0	0					0	0%
				Kegiatan Penyusunan Buku Profil Pelayanan	Output Terlaksananya penyusunan buku profil mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan								
				Kegiatan Sosialisasi Peraturan di Bidang Perizinan Bagi Masyarakat dan Pelaku usaha	Outcome Persentase Tersedianya Informasi Perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha							0	
				Kegiatan Sosialisasi Peraturan di Bidang Perizinan Bagi Masyarakat dan Pelaku usaha	Output Terlaksananya penyusunan buku profil mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan								
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		652,244,000	630,439,630	355,236,000	320,636,550	90.26%	417,400,000	1,368,476,180	328%
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		326,122,000	315,219,815					315,219,815	0.00%
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan		142,718,500	133,393,815					133,393,815	0.00%

					Penanaman Modal									
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Output Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	87,747,500	86,470,000	287,567,500	256,094,350	89.06%	335,306,100	677,870,450	0.00%
						Outcome Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko								
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Outcome Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	95,656,000	95,356,000	67,668,500	64,542,200	95.38%	82,093,900	241,992,100	0.00 %
						Output Jumlah Inspeksi Lapangan Terhadap Kegiatan Usaha								
					Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		750,474,000	402,810,800	507,900,200	459,552,023	90.48%	429,159,200	1,291,522,023	300.94%
					Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Berdasarkan Unit Kompetensi		375,237,000	201,405,400					201,405,400	0.00%
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		375,237,000	201,405,400	76,876,000	60,582,561	78.81%	162,409,200	424,397,161	0.00%
					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		0	0	431,024,200	398,969,462	92.56%	266,750,000	665,719,462	0.00%
					Program Penempatan Tenaga Kerja									
					Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		223,831,000	199,619,500	31,653,000	19,783,350	62.50%	0	219,402,850	0.00%
					Pelayanan Antar Kerja		223,831,000	199,619,500					199,619,500	0.00%

				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		0	0	31,653,000	19,783,350	62.50%		19,783,350	0.00%
				Perluasan Kesempatan Kerja		0	0					0	0.00 %
				Program Hubungan Industrial		107,007,000	102,053,200	827,808,950	376,917,800	45.53%	496,730,716	975,701,716	196.42%
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota		107,007,000	102,053,200					102,053,200	0.00%
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan		0	0	827,808,950	376917800	45.53%	462,418,316	839,336,116	0.00%
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kotata		0	0				34,312,400	34,312,400	0.00%

KETERANGAN TABEL:

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 6 program kegiatan yang disusun pada tahun 2022 berdasarkan urusan penanaman modal dan tenaga kerja. Masing-masing dari program tersebut memiliki target dan realisasi pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target tahun 2022 Rp 687.758.050 dan capaian realisasi Rp 559.532.117 dengan persentase 81,36 %.
2. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target tahun 2022 Rp 114.562.800 dan capaian realisasi Rp 111.151.990 dengan persentase 97,82%.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target tahun 2022 Rp 355.236.550 dan capaian realisasi Rp 320.636.550 dan persentase capaian 90,26%.
4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target tahun 2022 Rp 507.900.200 dan capaian realisasi Rp 459.552.023 dan persentase capaian 90,48%.
5. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan target tahun 2022 Rp 31.653.000 dan capaian realisasi Rp 19.783.350 dan persentase capaian 62,50%.
6. Program Hubungan Industrial dengan target tahun 2022 Rp 827.808.950 dan capaian realisasi Rp 376.917.800 dan persentase capaian 45,53%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat berorientasi kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati bersama dan berdasarkan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan yang menggambarkan bahwa pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang sudah dapat dikategorikan BAIK dan keadaan ini selalu akan ditingkatkan setiap tahunnya.

TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi			4.39	4.79	5.20	5.60	4.75%	5.13%	5.52	5.60	RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
2	Tingkat Pengangguran Terbuka			4.84	4.72	4.60	4.48	4.84	4.69	4.72	4.48	Berdasarkan RTKD dan informasi ketenagakerjaan tahun 2019
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			81	82	96.87		99.28	90.62	96.87	97	IKM diambil dari data laporan survey kepada masyarakat (SKM) tahun 2022

Keterangan Tabel :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang diukur dari 3 indikator yang disusun sesuai dokumen Rencana Strategis periode sebelumnya yakni 2018-2023 yaitu

- a. Laju Pertumbuhan Ekonoomi. Untuk target Tahun 2022 dan 2023 diambil dari Rencana Strategis 2018-2023 dan proyeksi Tahun 2024-2025 diambil dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka disusun Berdasarkan RTKD dan informasi ketenagakerjaan tahun 2019 dan proyeksi Tahun 2024-2025 diambil dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat diambil dari data laporan survey kepada masyarakat (SKM) tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2024-2025 diambil dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa hal kritis yang terkait dengan pelayanan yang harus ditindaklanjuti yaitu :

- a. Kurang optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah teknis terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- b. Kurang optimalnya fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan oleh Perangkat Daerah teknis/ Instansi terkait.
- c. Masyarakat/ pelaku usaha masih enggan untuk pengurusan perizinan.
- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha tentang pengurusan perizinan dan non perizinan.
- e. Kurang optimalnya kerjasama antar Perangkat Daerah terkait di dalam menjalankan dan menegakkan Perda.
- f. Masih rendahnya keterampilan SDM Aparatur dalam mengadopsi dan menjalankan jaringan / mengakses aplikasi Teknologi Informasi di dalam pelayanan perizinan dan non perizinan pada pelayanan publik.

- g. Belum adanya kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang representatif untuk sebuah pelayanan yang profesional.

2. Permasalahan dan Hambatan yang akan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya adalah:

A. Urusan Penanaman Modal

Dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya informasi peluang penanaman modal kepada investor
- 2) Belum optimalnya promosi penanaman modal yang massif dan tepat sasaran
- 3) Keterbatasan ruang/lahan untuk penanaman modal.

B. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan dalam urusan tenaga kerja adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja
- 2) Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja keluar negeri dan antar daerah.
- 3) Kualitas SDM pencari kerja yang masih rendah.

3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam operasionalnya ditantang untuk dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat merubah image masyarakat terhadap pelayanan yang berbelit-belit serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menghadapi tantangan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kajian terhadap peluang investasi
- 2) Melaksanakan promosi secara massif dan tepat sasaran
- 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
- 4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Investasi Penanaman Modal
- 5) Melaksanakan Fasilitasi kemudahan investasi

- 6) Melaksanakan pendataan tenaga kerja dan kesempatan kerja
- 7) Melaksanakan Sosialisasi penempatan tenaga kerja
- 8) Peningkatan hubungan industrial, koordinasi dengan pengusaha dan pekerja .
- 9) Peningkatan kualitas SDM aparatur pelayanan
- 10) Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- 11) Melaksanakan tindak lanjut pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan
- 12) Menyusun dan melaksanakan evaluasi terhadap Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 13) Melaksanakan sosialisasi perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis disusun berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Pelaksanaan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel 2.4.1 berikut ini.

Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100% bulan	3.319.562.592	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100% bulan	3.549.115.200	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan keuangan perangkat daerah	14 bulan	2.687.959.842	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase layanan keuangan perangkat daerah	14 bulan	2.907.825.276	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.687.959.842	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.907.825.276	
		Jumlah gaji yang dibayarkan	14 bulan				Jumlah gaji yang dibayarkan	0 bulan		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	1 tahun	293.974.750	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	1 tahun	297.774.561	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.626.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.623.911	
		Jumlah komponen instalasi listrik	19 Jenis				Jumlah komponen instalasi listrik	0 Jenis		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.683.600	
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun	1 Tahun				Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun	0 Tahun		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	37.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	34.710.500	
		Jumlah barang cetak dan fotocopy dan dekorasi yang disediakan	11 Jenis				Jumlah barang cetak dan fotocopy dan dekorasi yang disediakan	0 Jenis		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	215.992.250	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	219.742.250	
		Jumlah makan dan minum yang disediakan	550 oh				Jumlah makan dan minum yang disediakan	0 oh		
		Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	1 Tahun				Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	0 Tahun		
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	13.356.500	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	7.014.300	
		Jumlah arsip dinamis yang tertata	1 Tahun				Jumlah arsip dinamis yang tertata	0 Tahun		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1	203.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	1	202.993.473	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	
		Jumlah surat menyurat yang disediakan	19 Jenis				Jumlah surat menyurat yang disediakan	0 Jenis		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	49.999.590	

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	149.993.883	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipelihara	1 tahun	134.628.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipelihara	1 tahun	140.521.890	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	84.808.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	70.799.290	
		Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan	0 Unit				Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan	0 Unit		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	29.820.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	29.722.600	
		Jumlah kendaraan yang dipelihara	9 unit				Jumlah kendaraan yang dipelihara	0 unit		
		Jumlah sopir	2 orang				Jumlah sopir	0 orang		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	
		Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit				Jumlah gedung yang dipelihara	0 Unit		
		Tersedianya ruang rapat	1				Tersedianya ruang rapat	0		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		persentase pencari kerja yang dilatih	2,29 persen	422.436.600	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		persentase pencari kerja yang dilatih	2,29 persen	308.122.000	
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan	77 Orang	422.436.600	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan	77 Orang	308.122.000	
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DPMPTSP	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	17 Orang	163.812.400	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DPMPTSP	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	17 Orang	127.519.700	
		Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	32 orang				Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	0 orang		
Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	DPMPTSP	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	60 Lembaga	258.624.200	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	DPMPTSP	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	60 Lembaga	180.602.300	
		Jumlah peserta pelatihan yang dilatih oleh Lembaga Pelatihan Kerja	30 Orang				Jumlah peserta pelatihan yang dilatih oleh Lembaga Pelatihan Kerja	0 Orang		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif	42,61 %	143.304.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif	42,61 %	731.290.484	
Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi yang diberikan stimulan BPJS Ketenagakerjaan	1260 Orang	108.304.000	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peserta sosialisasi yang diberikan stimulan BPJS Ketenagakerjaan	1260 Orang	731.290.484	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	1 Laporan	108.304.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	DPMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar	1 Laporan	731.290.484	

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Pengupahan					sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			
		Jumlah tenaga kerja sektor informasi yang diberikan stimulasi BPJS Ketenagakerjaan	1000 orang				Jumlah tenaga kerja sektor informasi yang diberikan stimulasi BPJS Ketenagakerjaan	0 orang		
Sub Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	35.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	-	
Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara	35.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	100 Perkara	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah investor yang terdaftar	28 Investor	72.939.100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah investor yang terdaftar	28 Investor	7.820.000	
Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen peta potensi investasi yang dibuat	1 Dokumen	72.939.100	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen peta potensi investasi yang dibuat	1 Dokumen	7.820.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	72.939.100	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.820.000	
		Jumlah monitoring data investasi Kota Padang Panjang	1 Dokumen				Jumlah monitoring data investasi Kota Padang Panjang	1 Dokumen		
		Jumlah FS yang dibuat	2 Dokumen				Jumlah FS yang dibuat	0 Dokumen		
		Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan honor	2 orang				Jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan honor	2 orang		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100 %	136.550.300	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100 %	125.156.800	
		Persentase pengurusan pelayanan penanaman modal yang dikeluarkan	100 %				Persentase pengurusan pelayanan penanaman modal yang dikeluarkan	100 %		
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	30 Layanan	136.550.300	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	30 Layanan	125.156.800	
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	15.743.500	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	14.200.000	
		Jumlah sosialisasi dialog interaktif peraturan yang dilaksanakan	4 kali				Jumlah sosialisasi dialog interaktif peraturan yang dilaksanakan	0 kali		
		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	12 orang				Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	0 orang		
		Jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan	15 layanan				Jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan	0 layanan		

		Jumlah siaran	24 kali siaran				Jumlah siaran	0 kali siaran		
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang	120.806.800	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang	110.956.800	
		Jumlah sosialisasi dialog interaktif peraturan yang dilaksanakan	4 kali				Jumlah sosialisasi dialog interaktif peraturan yang dilaksanakan	0 kali		
		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	30 orang				Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	0 orang		
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Tingkat Kepatuhan perusahaan	0,95	-	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Tingkat Kepatuhan perusahaan	0,95	417.400.000	
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan melaporkan pelaporan LKPM	182 Perusahaan	-	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan melaporkan pelaporan LKPM	182 Perusahaan	417.400.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku Usaha	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku Usaha	294.207.912	
		Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan bimtek dan sosialisasi	182 Perusahaan				Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan bimtek dan sosialisasi	182 Perusahaan		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	15 Kegiatan Usaha	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	15 Kegiatan Usaha	123.192.088	
		Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam pelaksanaan modal	182 Perusahaan				Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam pelaksanaan modal	182 Perusahaan		

Keterangan Tabel :

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil analisis kebutuhan sesuai dengan rancangan awal RKPD yang memiliki 6 program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian 100% dan pagu indikatif Rp 3.319.562.592
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target capaian 2,29% dan pagu indikatif Rp 422.436.600
3. Program Hubungan Industrial dengan target capaian 42,61% dan pagu indikatif Rp 143.304.00
4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target capaian 28 investor dan pagu indikatif Rp 72.939.100
5. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target capaian 100% dan pagu indikatif Rp 136.550.300
6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target capaian 0.95 dan pagu indikatif Rp -

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mendapatkan anggaran alokasi Program dan Kegiatan Masyarakat karena tidak ada usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Publik mencakup dua hal pokok yaitu Pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa PTSP Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan .

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka sudah seharusnya kita melaksanakan seluruh jenis pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, artinya seluruh perizinan yang ada di Kota Padang Panjang harus melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Sebagaimana kita sadari bahwa terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan ciri pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara dan konsekuensi logis bahwa pemerintah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat luas adalah pelayanan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi :

- a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota.

Sistem pelayanan terpadu merupakan langkah strategis dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Padang Panjang secara keseluruhan dan juga dapat mendorong peningkatan kinerja birokrasi, dengan menitik beratkan bahwa pelayanan perizinan tidak dilihat dalam konteks kemudahan prosedural administrasi saja akan tetapi juga meliputi kualitas pelayanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, Visi pembangunan Kota Padang Panjang adalah “Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermartabat dan Bermartabat”.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota Padang Panjang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Walikota Padang Panjang serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan sesuai target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Sekaitan dengan hal tersebut diatas, dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP 2024-2026

	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya nilai investasi
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatnya kesempatan kerja
3	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk dapat meningkat dan tercapainya mutu pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas tidak akan terlepas dari ketersediaan anggaran, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta kebulatan tekad (komitmen) Pemerintah Kota Padang Panjang dan Perangkat Daerah terkait selaku Tim Teknis didalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sangat diperlukan program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah.
 - a. Penyediaan Jasa surat menyurat.
 - b. Penyediaan komponen dan jasa listrik, air dan komunikasi.
 - c. Penyediaan jasa umum kantor.
2. Adminsitration Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung.
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor.
 - c. Penyediaan barang cetak dan penggandaan.
 - d. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - e. Penataan arsip dinamis pada SKPD.
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

B. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja.

1. Pelaksanaan pelatihan berbasis unit kompetensi.
 - a. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.
 - b. Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sector swasta untuk penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

C. Program Penempatan Tenaga Kerja.

1. Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Perluasan kesempatan kerja.

D. Program Hubungan Industrial.

1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kereja serta pengupahan.
2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

E. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 - a. Penyediaan Peta Potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota.

F. Program Pelayanan Penanaman Modal.

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

TABEL 3.3.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS/CARA HITUNG	DATA TUNGGAL
Tenaga Kerja					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	%	Perbandingan antara kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan dalam RTKD yang sumber dana dari APBD	Jumlah kegiatan ketenagakerjaan/Jumlah rencana kegiatan dalam RTKD * 100%	- APBD - RTKD
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	Perbandingan antara jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih yang sumber dananya dari APBD, APBD Provinsi dan APBN	Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi/jumlah tenaga kerja yang dilatih * 100%	- Data peserta pelatihan - APBD - APBD Provinsi - APBN
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	Kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi dengan membandingkan antara nilai tambah dengan upah yang diberikan atau jam kerja	Jumlah output yang dihasilkan/Total Jam kerja atau upah * 100%	- PDRB
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Sturuktur Skala Upah, dan terdaftar data BPJS ketenagakerjaan	%	Membandingkan Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak dengan total perusahaan seluruhnya dalam jangka waktu 1 tahun	Jumlah perusahaan dengan tata kelola yang layak / jumlah perusahaan dalam 1 tahun * 100%	- BPS - Aplikasi Wajib daftar perusahaan
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar negeri) melalui	%	Membandingkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dengan jumlah	Jumlah penempatan tenaga kerja/jumlah tenaga kerja terdaftar * 100%	- BPS - AK 1

	mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota		tenaga kerja yang terdaftar dalam 1 tahun terakhir		
Penanaman Modal					
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	Perbandingan antara nilai invetasi tahun N dengan investasi tahun sebelumnya	Nilai investasi tahun N/Investasi tahun sebelumnya * 100%	- Data investasi

TABEL 3.3.2
INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	INDIKATOR TPB	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS/CARA HITUNG	DATA TUNGGAL
Tenaga Kerja					
1	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	Mengukur keseimbangan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dengan jumlah tenaga kerja, semakin tinggi cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan maka semakin baik kesimbangannya.	Jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan/jumlah tenaga kerja * 100%	- Data BPJS Naker
2	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	%	Memberikan gambaran mengenai produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian dalam 1 tahun terakhir	Nilai tambah pertanian / jumlah tenaga kerja sektor pertanian * 100%	- BPS
3	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja pertahun	%	Rata-rata laju pertumbuhan PDRB per tenagakerja dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan perhitungan PDRB harga konstan	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB Riil per orang bekerja*100%	- BPS
4	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	%	Penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap /pekerja keluarga, pekerja bebas berdasarkan jenis kelamin	Penduduk yang bekerja di sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin/jumlah penduduk yang bekerja * 100%	- BPS

5	Persentase tenaga kerja formal	%	Menghitung persentase jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal	Jumlah pekerja sektor formal/jumlah pekerja seluruhnya * 100%	- BPS
6	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	%	Menghitung persentase jumlah tenaga kerja informal sektor pertanian	Jumlah tenaga kerja informal sektor pertanian/jumlah tenaga kerja seluruhnya*100%	- BPS
7	Upah rata-rata per pekerja	Rupiah	Rata rata upah yang diterima satu orang pekerja per bulan	Jumlah upah yang diterima/jumlah pekerja yang menerima upah dalam 1 bulan	- BPS
8	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	%	Membandingkan jumlah penambahan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Jumlah pengangguran/jumlah angkatan kerja * 100%	- BPS
9	Tingkat setengah pengangguran	%	Mereka yang bekerja dibawah dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan	Jumlah pekerja yang tergolong setengah pengangguran / jumlah penduduk yang bekerja * 100%	- BPS
10	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	%	Membandingkan jumlah pekerja pada industry pariwisata dengan total pekerja dalam 1 tahun	Jumlah pekerja sektor pariwisata/jumlah pekerja keseluruhan*100%	- BPS
11	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	%	Membandingkan jumlah pekerja pada industry manufaktur dengan total pekerja dalam 1 tahun	Jumlah pekerja sektor manufaktur/jumlah pekerja keseluruhan*100%	- BPS

Penanaman Modal					
1	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah	Menghitung rata-rata jumlah kantor bank dan ATM untuk 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM/100.000 penduduk dewasa	- BPS
2	Rata-Rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	ukuran	Menghitung jarak atau akses lembaga keuangan yang akan digunakan oleh masyarakat	Jumlah lembaga keuangan (Bank Umum)/Panjang jalan keseluruhan	- BPS

TABEL 3.3.3
INDIKATOR PROGRAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS/CARA HITUNG	DATA TUNGGAL
Tenaga Kerja					
1	Persentase pencari kerja yang dilatih	%	Perbandingan jumlah pencari kerja yang dilatih dengan total angkatan kerja dalam 1 (satu) tahun dari sumber dana APBD, Provinsi maupun APBN yang dinyatakan dalam persentase	Jumlah pencari kerja yang dilatih/ Jumlah angkatan kerja yang terdaftar *100%	-Jumlah pencari kerja -Jumlah angkatan kerja
2	Persentase penempatan tenaga kerja	%	Perbandingan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dengan total jumlah pencari kerja	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan/jumlah pencari kerja *100%	-Jumlah tenaga kerja -Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
3	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif	%	Peningkatan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang aktif dengan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang di daftarkan yang dinyatakan dalam persentase	Jumlah peningkatan peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif/jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang didaftarkan *100%	-Jumlah peningkatan peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif -Jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang di daftarkan
Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan jumlah investor yang terdaftar dalam penanaman modal	%	Perbandingan jumlah investor yang menanamkan modalnya di kota Padang Panjang dengan target investor dinyatakan dalam persentase	Jumlah investor yang terdaftar dalam penanaman modal/Target investor *100%	-Jumlah investor yang terdaftar dalam penanaman modal -Target investor

2	Nilai Investasi	Milyar	Jumlah nilai investasi pada tahun berjalan	Nilai investasi pada tahun berjalan	Nilai investasi
3	Persentase pengurusan pelayanan penanaman modal yang dikeluarkan	%	Perbandingan jumlah pengurusan penanaman modal yang terlayani dengan jumlah target yang akan dilayani dinyatakan dalam persentase	(Jumlah pengurusan penanaman modal yang terlayani/Jumlah target yang akan dilayani) *100%	-Pengurusan penanaman modal yang terlayani -Jumlah target yang akan dilayani
4	Tingkat kepatuhan perusahaan	%	Menghitung tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU	Jumlah perusahaan yang patuh/Jumlah perusahaan keseluruhan dalam Wajib Laport Perusahaan *100%	-Jumlah perusahaan yang patuh -Jumlah perusahaan keseluruhan

Tabel 3.3.4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		DPMP TSP		3.989.539.740	APBD			4.262.709.740
					NON URUSAN			-	2.915.230.540	APBD	-	-	3.068.400.540
2	7	1			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	persentase pemenuhan pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	DPMP TSP	100%	2.915.230.540	APBD		100%	3.068.400.540
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrassi keuangan perangkat daerah	DPMP TSP	100%	2.404.293.540	APBD	-	100%	2.415.293.540
2	7	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMP TSP	336 orang/bulan	2.404.293.540	APBD		336 orang/bulan	2.415.293.540
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	DPMP TSP	100%	11.000.000	APBD	-	0%	-
2	7	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMP TSP	100%	11.000.000	APBD	-	-	-
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrasi umum perangkat daerah	DPMP TSP	100%	166.000.000	APBD		100%	300.000.000
2	7	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	DPMP TSP	4 Paket	3.000.000	APBD		8 Jenis	3.000.000
2	7	18	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMP TSP	4 Paket	33.000.000	APBD		3 Jenis	33.000.000
2	7	18	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	DPMP TSP	12 Paket	20.000.000	APBD		8 jenis	34.000.000
2	7	18	2.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMP TSP	24 Laporan	100.000.000	APBD		1 Tahun	220.000.000
2	7	18	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMP TSP	4 Dokumen	10.000.000	APBD		3 Jenis	10.000.000
2	18	1	20.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	DPMP TSP	0%	-	APBD		100%	20.000.000
2	18	1	20.7	06	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	DPMP TSP	-		APBD		2 Unit	20.000.000

2	18	1	20.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipenuhi	DPMPPTSP	100%	160.848.000	APBD		100%	177.848.000
2	18	1	20.8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPPTSP	50 Lembar, 10 Buku	6.000.000	APBD		50 Lembar, 10 Buku	3.000.000
2	18	1	20.8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang Disediakan	DPMPPTSP	48 rekenimng dan 10 Jenis	50.000.000	APBD		48 rekening dan 10 jenis	50.000.000
2	18	1	20.8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang	DPMPPTSP	1 Tenaga kebersihan 2 orang tenaga keamanan 2 orang sopir, 1 tahun	104.848.000	APBD		1 tenaga kebersihan 2 orang tenaga keamanan 2 orang sopir, 1 Tahun	124.848.000
2	18	1	20.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	DPMPPTSP	100%	173.089.000	APBD		100%	155.259.000
2	18	1	20.9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPPTSP	2 kendaraan roda empat dan 9 kendaraan roda 2	113.089.000	APBD		2 kendaraan roda empat dan 9 kendaraan roda 2	103.089.000
2	18	1	20.9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPMPPTSP	1 tahun	30.000.000	APBD		1 tahun	32.170.000
2	18	1	20.9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPMPPTSP	1 unit	30.000.000	APBD		1 unit	20.000.000
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				138.200.000				258.200.000
2	18	2			Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	DPMPPTSP	0%	-	APBD		12%	75.000.000
2	18	2	2.02		Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan Video Promosi Investasi	DPMPPTSP	-	-	APBD		1 Dokumen	75.000.000
2	18	2	2.02	02	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPPTSP	-	-	APBD		1 Dokumen	75.000.000
2	18	4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	DPMPPTSP		108.200.000	APBD			108.200.000
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbitan izin yang diekluarkan sesuai SOP	DPMPPTSP		108.200.000	APBD			108.200.000
					Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik		120 pelaku usaha	1.000.000	APBD		140 pelaku usaha	1.000.000

					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan		75 orang	1.000.000	APBD		85 orang	1.000.000
					Pemantauan Pemenuhan momitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan dan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non Perizinan penanaman modal		12 kegiatan	1.000.000	APBD		12 kegiatan	1.000.000
2	18	4	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPPTSP	120 pelaku usaha	14.000.000	APBD		140 pelaku usaha	14.000.000
2	18	4	2.01	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPPTSP	75 orang	67.400.000	APBD		85 orang	67.400.000
2	18	4	2.01	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	DPMPPTSP	12 kegiatan	23.800.000	APBD		12 kegiatan	23.800.000
2	18	3			Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi per tahun		35.000.000.000 Rupiah	30.000.000	APBD		37.000.000.000 Rupiah	75.000.000
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah temu usaha dengan investor dan pengusahaan minang di rantau		2 Dokumen	30.000.000	APBD		2 Dokumen	75.000.000
2	18	3	2.01	02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota		2 dokumen	30.000.000	APBD		2 dokumen	75.000.000
2	18	5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan Perusahaan	DPMPPTSP		-	DAK			-
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		DPMPPTSP		-	DAK			-
2	18	5	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	DPMPPTSP			DAK			

						Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							
2	18	5	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP			DAK			
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya							-
						Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal							-
2	18	5	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Inspeksi Lapangan Terhadap Kegiatan Usaha	DPMPTSP		-	DAK			-
						Jumlah Evaluasi Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Pelaksanaan perizinan Berusaha			-				-
						Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan			-				-
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				936.109.200	APBD			936.109.200
2	7	5			Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	DPMPTSP		280.000.000	APBD			280.000.000
2	7	5	2.01		Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	DPMPTSP	100%	280.000.000	APBD			280.000.000
2	7	5	2.01		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	DPMPTSP	15 Perkara	15.000.000	APBD		10 perkara	15.000.000
2	7	5	2.01	05	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga kerja dan Fasilitas Ketenagakerjaan Pekerja	DPMPTSP	8000 Orang	250.000.000	APBD		8000 Orang	250.000.000
2	7	5	2.01	3	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	DPMPTSP	15 Perkara	15.000.000	APBD		15 Perusahaan	15.000.000
2	7	3			Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih	DPMPTSP	100%	331.109.200	APBD		100%	331.109.200

2	7	3	2.01		Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase Pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	DPMPTSP	100%	331.109.200	APBD		100%	331.109.200
2	7	3	2.01	01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	DPMPTSP	80 Orang	156.109.200	APBD		100 orang	156.109.200
2	7	3	2.01		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktifitas pada Tahun n	DPMPTSP	2 Lembaga	175.000.000	APBD		48 orang/3 LPK	175.000.000
2	7	4			Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	DPMPTSP	0,04%	325.000.000	APBD		0,08%	325.000.000
2	7	4	2.01		Pelayanan antar Kerja di daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	DPMPTSP	100%	225.000.000	APBD		100	225.000.000
2	7	4	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	DPMPTSP	100 orang	25.000.000	APBD		150 orang	25.000.000
2	7	4	2.01	02	Perluasan Kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	DPMPTSP	10 orang	200.000.000	APBD		20 orang	200.000.000
2	7	4	203		Pengelolaan informasi pasar kerja	Persentase pemenuhan pengelolaan informasi pasar kerja	DPMPTSP	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
2	7	4	203	03	Jobfair/bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja	DPMPTSP	1 orang	100.000.000	APBD		30 orang	100.000.000

Keterangan Tabel:

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Padang Panjang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan tiga urusan yaitu non urusan, urusan pemerintah bidang penanaman modal dan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Non Urusan memiliki 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu indikatif Rp 2.915.230.540. Prakiraan maju tahun 2025 sekitar Rp 3.068.400.540 dengan faktor pertimbangan antara lain kenaikan pangkat/golongan ASN, kenaikan harga dan perubahan standar biaya.
2. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal memiliki 4 program dengan 3 program yang dijalankan pada tahun 2024 yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu indikatif Rp 138.200.000. Prakiraan maju tahun 2025 sekitar Rp 258.200.000 dengan faktor pertimbangan penambahan 1 program kegiatan, kenaikan harga dan perubahan standar biaya.
3. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja memiliki 3 program yaitu Program Hubungan Industrial, Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja dengan pagu indikatif Rp 936.109.200. Prakiraan tahun 2025 Rp 936.109.200, hal ini dengan faktor pertimbangan bahwa penyusunan rencana kegiatan sudah menyesuaikan perubahan standar biaya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rencana program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif pada DPMPTSP sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	18	(19)	(20)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kota Padang Panjang
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	76.47%	100%	2,915,230,540	100%	3,068,400,540	100%	3,068,400,540	100%	9,052,031,620		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	94.58%	100%	2,404,293,540	100%	2,415,293,540	100%	2,415,293,540	100%	7,234,880,620		
				Persentase layanan keuangan perangkat daerah	94.58%	100%	2,404,293,540	100%	2,415,293,540	100%	2,415,293,540	100%	7,234,880,620		
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94.58%	336 orang/bulan	2,404,293,540	336 orang/bulan	2,415,293,540	336 orang/bulan	2,415,293,540	1008 orang/bulan	7,234,880,620		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	-	100%	11,000,000	-	-	-	-	100%	11,000,000		
				Persentase layanan administrasi perangkat daerah	-	24 paket	11,000,000	-	-	-	-	24 paket	11,000,000		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	24 paket	11,000,000	-	-	-	-	24 paket	11,000,000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	86.87%	100%	166,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	766,000,000		
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	86.87%	100%	166,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	766,000,000		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00%	4 paket	3,000,000	4 paket	3,000,000	4 paket	3,000,000	12 paket	9,000,000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	95.47%	4 paket	33,000,000	4 paket	33,000,000	4 paket	33,000,000	12 paket	99,000,000		
			Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	64.50%	12 paket	20,000,000	12 paket	34,000,000	12 paket	34,000,000	36 paket	88,000,000		

			Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan										
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.29%	24 laporan	100,000,000	24 laporan	220,000,000	24 laporan	220,000,000	72 laporan	540,000,000	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80.09%	4 dokumen	10,000,000	4 dokumen	10,000,000	4 dokumen	10,000,000	12 dokumen	30,000,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-	-	-	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	40,000,000	
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	2 unit	20,000,000	2 unit	20,000,000	4 unit	40,000,000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	54.55%	100%	160,848,000	100%	177,848,000	100%	177,848,000	100%	516,544,000	
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	54.55%	100%	160,848,000	100%	177,848,000	100%	177,848,000	100%	516,544,000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.33%	12 laporan	6,000,000	12 laporan	3,000,000	12 laporan	3,000,000	36 laporan	12,000,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	70.89%	48 laporan	50,000,000	48 laporan	50,000,000	48 laporan	50,000,000	144 laporan	150,000,000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84.43%	12 Laporan	104,848,000	12 Laporan	124,848,000	12 Laporan	124,848,000	36 Laporan	354,544,000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	69.89%	100%	173,089,000	100%	155,259,000	100%	155,259,000	100%	483,607,000	
				Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipelihara	69.89%	100%	173,089,000	100%	155,259,000	100%	155,259,000	100%	483,607,000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32.24%	5 Unit	30,000,000	12 unit	32,170,000	12 unit	32,170,000	12 unit	94,340,000	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99.53%	1 Unit	30,000,000	1 unit	20,000,000	1 unit	20,000,000	1 Unit	70,000,000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77.90%	11 Unit	113,089,000	11 Unit	103,089,000	11 Unit	103,089,000	11 Unit	319,267,000	
	Meningkatkan kinerja pelayanan Perizinan Terpadu													

			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	96.87%	108,200,000	96.88%	108,200,000	96.89%	108,200,000	100%	324,600,002		
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	-	100%	108,200,000	100%	108,200,000	100%	108,200,000	100%	324,600,002		
			Sub Kegiatan 'Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		120 pelaku usaha	1,000,000	140 pelaku usaha	1,000,000	150 pelaku usaha	1,000,000	410 Pelaku usaha	3,000,000		
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	120 pelaku usaha	14,000,000	140 pelaku usaha	14,000,000	150 pelaku usaha	14,000,000	410 Pelaku usaha	42,000,000		
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		75 orang	1,000,000	85 orang	1,000,000	100 orang	1,000,000	260 orang	3,000,000		
			Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	75 orang	67,400,000	85 orang	67,400,000	100 orang	67,400,000	260 orang	202,200,000		
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal		12 kegiatan	1,000,000	12 kegiatan	1,000,000	12 kegiatan	1,000,000	36 Kegiatan	3,000,000		
			Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	12 kegiatan	23,800,000	12 kegiatan	23,800,000	12 kegiatan	23,800,000	36 Kegiatan	71,400,000		

Menurunkan tingkat pengangguran															
	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja														
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang Dilatih	85.69%	0.32%	331,109,200	0.40%	331,109,200	0.48%	341,109,200	1.20%	1,003,327,600		
			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	85.69%	100%	331,109,200	100%	331,109,200	100%	341,109,200	100%	1,003,327,600		
				Jumlah pelatihan berbasis komputer yang dilaksanakan	85.69%	112 orang	331,109,200	114 orang	331,109,200	186 orang	341,109,200	186 orang	1,003,327,600		
			Sub Kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	78.81%	80 orang	156,109,200	100 orang	156,109,200	120 orang	166,109,200	300 orang	478,327,600		
			Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan kerja	• Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	92.56%	2 lembaga	175,000,000	6 lembaga	175,000,000	6 lembaga	175,000,000	14 Lembaga	525,000,000		
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	62.50%	0.04%	325,000,000	0.08%	325,000,000	0.12%	325,000,000	0.24%	975,000,000		
			Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	62.50%	100%	225,000,000	100%	225,000,000	100%	225,000,000	100%	675,000,000		
				Jumlah penambahan kesempatan kerja	62.50%	145 orang	225,000,000	235 orang	225,000,000	340 orang	225,000,000	720 orang	675,000,000		
			Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	62.50%	100 orang	25,000,000	150 orang	25,000,000	200 orang	25,000,000	450 orang	75,000,000		
			Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-	10 orang	200,000,000	20 orang	200,000,000	30 orang	200,000,000	60 orang	600,000,000		
			Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah job fair yang dilaksanakan	-	1 job fair	100,000,000	1 job fair	100,000,000	2 job fair	100,000,000	4 job fair	300,000,000		
			Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	-	1 orang	100,000,000	30 orang	100,000,000	30 orang	100,000,000	61 orang	300,000,000		
Menurunkan Angka Kemiskinan															

	Mengoptimalkan perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin													
			Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif	-	32%	280,000,000	32%	280,000,000	32%	280,000,000		840,000,000	
			Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-	100%	280,000,000	100%	280,000,000	100%	280,000,000	100%	840,000,000	
				Jumlah tenaga kerja sektor informal yang diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan		8289 orang	280,000,000	8500 orang	280,000,000	8736 orang	280,000,000	25525 orang	840,000,000	
			Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	-	8000 orang	250,000,000	8000 orang	250,000,000	8000 orang	250,000,000	24000 orang	750,000,000	
			Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-	15 perkara	15,000,000	10 Perkara	15,000,000	10 Perkara	15,000,000	35 perkara	45,000,000	
			Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	-	15 perkara	15,000,000	10 Perkara	15,000,000	10 Perkara	15,000,000	35 perkara	45,000,000	
Meningkatkan Nilai Investasi														
	Meningkatkan peluang investasi													
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	-	-	Rp -	12%	75,000,000	14%	75,000,000	14%	150,000,000	
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan video promosi investasi	-	-	Rp -	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	2 Dokumen	150,000,000	

			Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	-	-	Rp -	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	2 Dokumen	150,000,000		
			Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi per tahun	-	35,000,000,000 Rupiah	30,000,000	37,000,000,000 Rupiah	75,000,000	87,000,000,000 Rupiah	75,000,000	87,000,000,000 Rupiah	180,000,000		
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan	-	2 dokumen	30,000,000	2 dokumen	75,000,000	2 dokumen	75,000,000	6 dokumen	180,000,000		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-	2 dokumen	30,000,000	2 dokumen	75,000,000	2 dokumen	75,000,000	6 dokumen	180,000,000		

Keterangan Tabel:

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang 2024-2026 disusun berdasarkan tujuan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator pengukurannya. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang 2024-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 100%.
2. Tujuan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 96,87, 96,88, 96,89.
3. Tujuan Menurunkan tingkat pengangguran dengan sasaran Meningkatnya partisipasi angkatan kerja memiliki 2 program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 0,32%, 0,40%, dan 0,48% serta Program Penempatan Tenaga Kerja dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 0,04%, 0,08%, dan 0,12%.
4. Tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan dengan sasaran Mengoptimalkan Perlindungan Terhadap Tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin dengan Program Hubungan Industrial dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 32%.
5. Tujuan Meningkatkan nilai investasi dengan sasaran meningkatnya peluang investasi memiliki 2 program yakni Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target secara berturut dari tahun 2025-2026 yakni 12% dan 14% serta Program Promosi Penanaman Modal dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni Rp 35.000.000.000, Rp 37.000.000.000 dan Rp 87.000.000.000.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan harapan dapat mengakomodir semua kebutuhan berbagai pihak demi terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan serta tercapainya Visi dan Misi Walikota Padang Panjang sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang sangat tergantung kepada komitmen dan keseriusan segenap unsur dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola Sumber Daya Manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal Tahun 2024 seluruh kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat dipenuhi.

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun, dengan harapan kiranya akan mampu meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Padang Panjang, Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG**



FHANDY RAMADHONA, SSTP, M.M

Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002